

**DETERMINAN TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL SEBAGAI PEMODERASI (STUDI PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN)**

T. Prasetyo¹, S. Djaddang², N. Ahmar³

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Indonesia^{1,2,3}

Abstract. *The purpose of this research is to examine the effect of independent commissioner, audit committee, and audit quality on tax avoidance which moderated by institutional ownership at mining companies in Indonesia Stock Exchange. The samples in this study amounted to 33 mining company in Indonesia Stock Exchange period 2017-2019. The test results show that independent commissioner and audit quality have a negative effect on tax avoidance. Meanwhile audit committee has a positive effect on tax avoidance. Furthermore, Institutional ownership moderate independent commissioner, audit committee, and audit quality on tax avoidance (quasi moderation).*

Keywords. *audit; independent commissioner; institutional ownership; tax avoidance.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dan variabel kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, variabel komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, variabel kepemilikan institusional memoderasi variabel komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* (quasi moderasi).

Kata kunci. audit; kepemilikan institusional; komisaris independen; *tax avoidance*.

Corresponding author. Email: toniprasetyo23@gmail.com¹, djaddangsyahril@gmail.com², ahmarnurmala@gmail.com³

How to cite this article. Prasetyo, T., Djaddang, S., & Ahmar, N. (2021). Determinan *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 267–280.

History of article. Received: April 2021, Revision: Juni 2021, Published: Agustus 2021

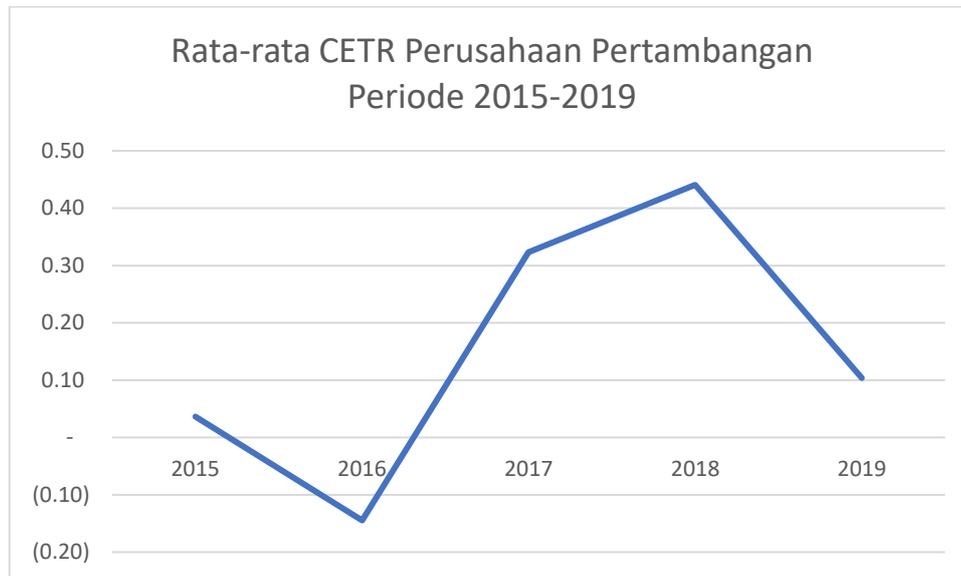
Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i2.31919

Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal, penghindaran pajak ini dilakukan guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (Ginting, 2016). Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan

kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Penghindaran pajak merupakan sesuatu yang unik, karena praktik ini di sisi lain diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak dapat mengurangi penerimaan negara yang mana membuat suatu dilema dalam penerapannya.



Gambar 1. Rata-rata CETR Perusahaan Pertambangan periode 2015-2019

Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 berfluktuasi. Serapan pajak dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ke kas negara tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 45% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 10%. Oleh karenanya, sektor pertambangan ini menjadi salah satu yang menarik untuk diteliti terkait adanya *gap* yang terjadi pada pembayaran pajak ke kas negara, yang mana sesuai dengan topik yang akan diteliti mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Semakin banyak komisaris independen diharapkan *corporate governance* didalam perusahaan meningkat, sehingga mampu mendorong manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017), Amalia (2018), dan Dewi (2019)

menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Riko (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Ginting (2016), Ayu dan Ery (2017, dan Primasari (2019) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tandean (2016) dan Amalia (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Ery (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) dan Dewi (2019) menyatakan bahwa

komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KAP *the big four* dianggap menjadi KAP yang berkompeten untuk mengaudit laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Tandean (2016) dan Primasari (2019) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan dalam membuat suatu keputusan harus memaksimalkan kesejahteraan para pemegang sahamnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016), Ayu dan Ery (2017), dan Amalia (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Peneliti masih menemukan perbedaan hasil penelitian terkait *corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak, hal ini diperkuat dengan masih terdapat fenomena praktik penghindaran pajak di Indonesia. Sehingga, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Amalia (2018) yang melakukan penelitian pengaruh

Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* dan Ginting (2016) yang melakukan penelitian pengaruh *Corporate Governance* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak serta bagaimana pengaruhnya apabila dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

Terkait dengan *tax avoidance*, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Masalah agensi berupa asimetri informasi akan terjadi ketika pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan pemasukan negara dari pemungutan pajak, sementara itu manajer (pihak perusahaan) lebih fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi dengan melakukan tindakan oportunistik untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan mengefisienkan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk juga beban pajak atau dengan kata lain perusahaan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak baik dengan cara *tax evasion* atau *tax avoidance* dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan penyebab timbulnya konflik kepentingan atau masalah agensi antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Sehubungan dengan hal tersebut masalah agensi dapat diminimalkan dengan biaya bonding yaitu dengan perusahaan (*agent*) membayar beban pajak secara patuh kepada pemerintah (*principal*).

Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan Riko (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dimana jika jumlah dewan komisaris independen

meningkat, maka tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen akan menurun, sehingga jumlah dewan komisaris independen yang meningkat dapat menekan adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ayu dan Ery (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* dan diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif. Karena komite audit bertugas sebagai membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, maka dengan adanya komite audit di suatu perusahaan dapat mencegah perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*.

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Amalia (2018) menguji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* dan memperoleh hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan maka kecenderungan dalam manipulasi untuk kepentingan perpajakan tidak akan dilakukan.

H3: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Ery (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara tingginya kepemilikan institusional yang terdapat dalam perusahaan dengan semakin tingginya pengendalian terhadap manajer perusahaan dimana hal ini nantinya dapat menekan adanya konflik kepentingan antara

prinsipal atau pemegang saham dengan manajemen sehingga akan mengurangi masalah keagenan serta dapat menekan terjadinya tindakan *tax avoidance*.

H4: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

H5: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

H6: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) adapun periode penelitian ini mencakup waktu tiga tahun yakni tahun 2017 s.d. 2019. Data penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yakni situs BEI (www.idx.co.id).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 123 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sementara sampelnya adalah 33 perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:96). Adapun kriteria sampel sebagai berikut 1) Perusahaan Pertambangan yang menerbitkan Laporan Keuangan lengkap periode 2017-2019; 2) Perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan

untuk penelitian selama periode 2017-2019; dan 3) Perusahaan Pertambangan yang tidak mengalami kerugian keuangan selama periode 2017-2019.

Tabel 1. Operasionalisasi variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Variabel Dependen			
Tax Avoidance	Untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan pengukuran <i>Cash Effective Tax Rate</i> (Riko, 2017).	CETR = $\frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pre-tax income}}$ Riko (2017)	Rasio
Variabel Independen			
Komisaris Independen	Komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Ginting, 2016).	$\frac{\text{jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$ Ginting (2016)	Rasio
Komite Audit	Komite audit diukur dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan (Tandean, 2016)	Σ KA Tandean (2016)	Rasio
Kualitas Audit	Kualitas audit diukur dengan menggunakan variable <i>dummy</i> yang bernilai 1 apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) <i>The Big Four</i> yaitu <i>Price Water House Cooper</i> —PWC, <i>Deloitte Touche Tohmatsu</i> , KPMG, dan <i>Ernst & Young</i> —E&Y, dan bernilai 0 apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) <i>The Big Four</i> (Primasari, 2019).	<i>dummy</i> : AP non The Big Four AP The Big Four Primasari (2019)	Nominal
Variabel Moderasi			
Kepemilikan Institusional	kepemilikan institusional diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan jumlah saham beredar (Amalia, 2018)	$\frac{\Sigma KSI}{\Sigma S} \times 100\%$ Amalia (2018)	Rasio
Variabel Kontrol			
Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan ditunjukkan melalui <i>log nat total aktiva</i> , karena dinilai bahwa ukuran ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi yang lainnya dan cenderung	Size= Logaritma Natural Total Asset	Rasio

	berkesinambungan antar periode (Primasari, 2019)	rut Primasari (2019)	
--	--	----------------------	--

Adapun model matematik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis SEM PLS dengan WarpPLS 6.0, dengan persamaan : $TA = \beta_0 + \beta_1KI + \beta_2KOA + \beta_3KUA + \beta_4KI * KIN + \beta_5KOA * KIN + \beta_6KUA * KIN + \beta_7UP + e$

Dalam hal ini :

TA : *Tax Avoidance*

KI : Komisararis Independen

KOA : Komite Audit

KUA : Kualitas Audit

KIN : Kepemilikan Institusional

UP : Ukuran Perusahaan

β_0 : Konstanta

β_1 - β_7 : Koefisien regresi

e : *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian ini dapat digambarkan pada tabel 2 statistik deskriptif di bawah ini:

Tabel 2. Deskriptif Statistik

Variabel	N	Min	Max	Median	Mode
TA(Y)	33	-1,521	3,819	-0,453	-0,453
KI (X1)	33	-0,649	1,493	-0,511	-0,649
KOA(X2)	33	-0,311	3,114	-0,311	-0,311
KUA(X3)	33	-1,303	0,744	0,744	0,744
KIN(M)	33	-1,354	1,751	0,026	1,061
UP(C)	33	-2,287	1,885	-0,096	-2,287

Sumber: Bursa Efek Indonesia, yang diolah kembali (2020)

Statistik Deskriptif tentang variabel penelitian menggambarkan bahwa variabel *Tax Avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -1,521 artinya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sebanyak 15,21% dari jumlah sampel penelitian. Adapun nilai maksimum sebesar 3,819 yang berarti sampel perusahaan penelitian maksimal sebanyak 38% yang melakukan penghindaran pajak. Nilai median dan modus sebesar -0,453 artinya perusahaan memiliki nilai tengah dan nilai yang sering muncul sebesar 45,3%.

Variabel KI memiliki nilai minimum sebesar -0,649 artinya perusahaan yang memiliki komisararis independen sebanyak 6,49%, dari jumlah sampel penelitian. Adapun

nilai maksimum sebesar 1,493 yang berarti sampel perusahaan penelitian maksimal sebanyak 14,9% yang memiliki komisararis independen. Nilai median dan modus sebesar -0,511 dan -0,649 artinya perusahaan memiliki nilai tengah 51,1% dan nilai yang sering muncul sebesar 64,9%.

Variabel KOA memiliki nilai minimum sebesar -0,311 artinya keberadaan komite audit di perusahaan sedikitnya 3,1%, dari jumlah sampel penelitian. Adapun nilai maksimum sebesar 3,114 yang berarti sampel perusahaan penelitian maksimal sebanyak 31,1% yang memiliki komite audit. Nilai median dan modus sebesar -0,311 artinya perusahaan memiliki nilai tengah dan nilai yang sering muncul sebesar 31,1%.

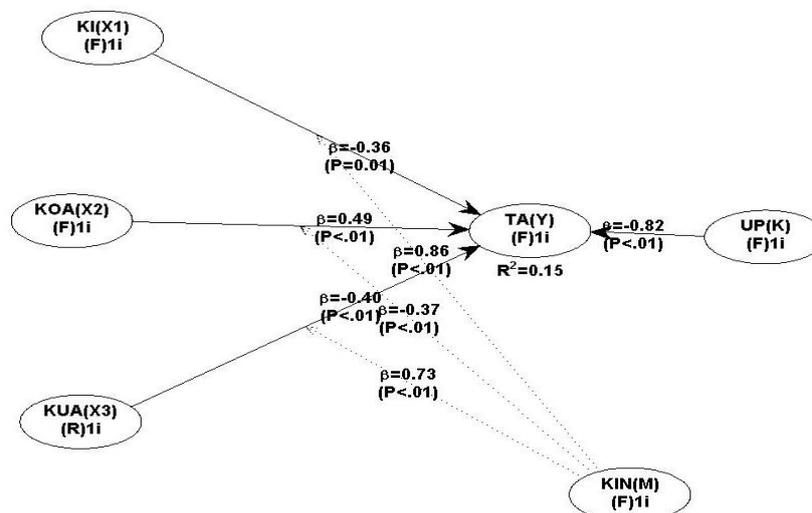
Variabel KUA memiliki nilai minimum sebesar -1,303 artinya perusahaan yang memiliki kualitas audit sebanyak 13%, dari jumlah sampel penelitian. Adapun nilai maksimum sebesar 0,744 yang berarti sampel perusahaan penelitian maksimal sebanyak 74,4% yang memiliki kualitas audit. Nilai median dan modus sebesar 0,744 artinya perusahaan memiliki nilai tengah dan nilai yang sering muncul sebesar 74,4%.

Variabel KIN memiliki nilai minimum sebesar -1,354 artinya perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh institusi sebanyak 13,5%, dari jumlah sampel penelitian. Adapun nilai maksimum sebesar 1,751 yang berarti sampel perusahaan penelitian maksimal sebanyak 17,51% yang kepemilikannya dimiliki oleh institusi. Nilai median dan modus sebesar 0,026 dan 1,061 artinya perusahaan memiliki nilai tengah sebesar 2,6% dan nilai yang sering muncul sebesar 10,6%.

Variabel UP memiliki nilai minimum sebesar -2,287 artinya ukuran perusahaan yang menjadi tolak ukur praktik penghindaran perpajakan sebanyak 2,8% dari jumlah sampel penelitian. Adapun nilai maksimum sebesar 1,885 yang berarti sampel perusahaan penelitian maksimal sebanyak 18,8% yang memiliki ukuran perusahaan sebagai tolak ukur praktik penghindaran perpajakan. Nilai median dan modus sebesar -0,096 dan -2,287 artinya perusahaan memiliki nilai tengah sebesar 9% dan nilai yang sering muncul sebesar 22,87%.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan. Dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan alat analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan program WarpPLS 6.00 berikut ini disajikan pengujian hipotesis dari model penelitian ini.



Gambar 2. Full model dengan moderator

Gambar diatas menunjukkan hubungan kausalitas antar variabel, dimana komisar independen, komite audit, kualitas audit sebagai variabel independen dan *tax avoidance*

sebagai variabel dependen dimana di moderasi oleh kepemilikan institusional serta dikontrol oleh ukuran perusahaan.

Tabel 3. Hasil Output Koefisien Jalur & Nilai Signifikansi

Jalur	Coefficients	P-Value
KI → TA	-0,359	0,010
KOA → TA	0,489	<0,001
KUA → TA	-0,403	0,004
Moderasi		
KI * KIN → TA	0,861	<0,001
KOA * KIN → TA	-0,374	0,008
KUA * KIN → TA	0,734	<0,001

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil pengujian pengaruh KI terhadap *tax avoidance* adalah negatif signifikan dengan koefisien jalur -0,359 p-value sebesar 0,010. KOA terhadap *tax avoidance* adalah positif signifikan dengan koefisien jalur 0,489 p-value <0,001. KUA terhadap *tax avoidance* adalah negatif signifikan dengan koefisien jalur -0,403 p-jalur 0,004. KIN memoderasi

KI, KOA, dan KUA terhadap *tax avoidance* secara signifikan

dengan koefisien 0,861 p-value <0,001, -0,374 p-value 0,008, dan 0,734 p-value <0,001. Model regresi untuk penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned}
 &TA \\
 &: \beta_0 - 0,359 KI \\
 &+ 0,489 KOA - 0,403 KUA \\
 &+ 0,861 KI \\
 &* KIN - 0,374 KOA * KIN \\
 &+ 0,734 KUA \\
 &* KIN - 0,817 UP + e
 \end{aligned}$$

Tabel 4. Model Fit and Quality Indices

Kriteria	Hasil	P-values	Rule of Thumb	Keterangan
Adjusted R2	-	-	≥ 0.70 (kuat), ≥ 0.45 (moderate), ≤ 0.25 (lemah)	Lemah
Average Path Coefficient (APC)	0,092	P=<0,001	P < 0,05	Diterima
Average R-Square (ARS)	0,147	P=0,093	P < 0,05	Ditolak
Average Adjusted R-Square (AARS)	-	P=0,147	P < 0,05	Ditolak
Average Block VIF (AVIF)	3,456	-	≤ 3.3, namun nilai ≤ 5, masih dapat diterima	Diterima
Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	2,058	-	≤ 3.3, namun nilai ≤ 5, masih dapat diterima	Diterima
Tenenhaus GoF (GoF)	0,384	-	≥ 0,10 (kecil), ≥0,25 (menengah), ≥ 0,36 (besar)	Besar

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan output *model fit and quality indices* mempunyai nilai Average adjusted R-squared (AARS)=-0,092, P=0,147, AVIF =3,456, acceptable if ≤5, ideally ≤= 3.3, AFVIF=2,058, acceptable if ≤=

5, ideally ≤= 3.3 dan GoF (GoF)=0,384, small ≥= 0.1, medium ≥= 0.25, large ≥=0.36.

Ketentuan untuk WarpPLS menyatakan bahwa nilai p untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05.

Nilai AVIF dan AFVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5 serta ketentuan untuk nilai GoF yaitu small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36 . mengacu pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah fit.

Pengujian R – Squared, Q-Squared and Collinearity VIF

Hasil pengolahan data atas *R-Squared, Q-Squared and Full Collinearity VIF* dapat disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 5. Pengujian R – Squared, Q- Squared and Collinearity VIF

<i>R – Squared</i> TA	0,147
<i>Q- Squared</i> TA	0,501
Collinearity VIF TA	1,271

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil *output R-Squared* dilihat besarnya R-Squared 0,147 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebesar 14,7% dan sisanya sebesar 85,3 % dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel komisaris independen (KI) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa peran dewan komisaris independen dalam perusahaan memilik dampak terhadap praktik penghindaran pajak. Dimana jika jumlah dewan komisaris independen meningkat, maka tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen akan menurun, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peelitian yang dilakukan oleh Riko (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, hasil penelitian ini

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Ery (2017) dan Primasari (2019) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel komite audit (KOA) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit dalam fungsinya sangat efektif untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Karena komite audit bertugas sebagai membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, maka dengan adanya komite audit di suatu perusahaan dapat mencegah perusahaan tersebut melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan peelitian yang dilakukan oleh Tandean (2016) dan Amalia (2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Eksandy (2017) dan Dewi (2019) yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance

Pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel kualitas audit (KUA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin berkualitasnya auditor dalam pengauditan, maka kecenderungan dalam manipulasi untuk kepentingan perpajakan tidak akan dilakukan. Dengan begitu audit yang dihasilkan berkualitas pula, dan mendukung transparansi yang merupakan salah satu konsep *Good Corporate Governance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2018) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tandean (2016) dan Primasari (2019) yang membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi

Pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel kepemilikan institusional (KIN) memoderasi hubungan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kepemilikan institusional yang terdapat dalam perusahaan dapat memperkuat pengaruh hubungan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi

Pengujian hipotesis H5 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel kepemilikan institusional (KIN) memoderasi hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kepemilikan institusional yang terdapat dalam perusahaan dapat memperlemah pengaruh hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi

Pengujian hipotesis H6 menunjukkan bahwa pada persamaan model variabel kepemilikan institusional (KIN) memoderasi hubungan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kepemilikan institusional yang terdapat dalam perusahaan dapat memperkuat pengaruh hubungan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang disajikan, dapat disimpulkan beberapa temuan terkait dengan hipotesis penelitian. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan keterbatasan antar lain: Pengambilan sampel yang sedikit, penelitian ini hanya terfokus pada beberapa variabel saja, sedangkan variabel lain yang terkait dengan *tax avoidance* relatif banyak, antara lain kepemilikan manajerial, risiko perusahaan dan CSR sehingga akan menghasilkan hasil yang berbeda.

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan penambahan variabel-variabel lain yang mempengaruhi *Tax Avoidance*, memperluas sampel perusahaan dan tidak hanya perusahaan pertambangan, memperluas tahun penelitian lebih dari tiga tahun. Saran untuk pemerintah yaitu diperlukan adanya peraturan dan regulasi perpajakan yang jelas dan spesifik, dan mempertimbangkan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan untuk transaksi *taxable income*.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved March 24, 2020, from <https://kemenkeu.go.id>
- (n.d.). Retrieved April 16, 2020, from <https://ortax.org>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalia, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 7 Nomor 4 (Universitas Diponegoro), 1–12.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*.
- Dewi, N., & Jati, I. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory Of The Corporation: Concepts, Evidence, And Implications. *Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992>
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Finnerty C., Merks P., Petriccione M., R. R. (2007). Fundamental of International Tax Planning. In *IBFD*.
- Ghozali dan Latan. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2013). Ghozali, Imam (2013). In *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. (VII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Koming Ayu Praditasari, N., & Ery Setiawan, P. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Primasari, N. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8 (FEB Universitas Budi Luhur), 21–40.
- Ridwan & Djaddang. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Value Added/Human Capital Sebagai Pemoderasi dan Non Discretionary Accrual Sebagai Pemediati*. Universitas Pancasila.
- Riko, I. M. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 1831–1859.
- Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/jabes-11-2018-0100>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis. In *ANDI (I) CV ANDI OFFSET*.
- Siew Yee, C., Sharoja Sapiei, N., & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. *Journal of Accounting and Investment*. <https://doi.org/10.18196/jai.190299>
- Sugianto, D. (2019, July 5). *detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita*. Retrieved March 26, 2020, from Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. CV. Alfabeta.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting*

Research.

<https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>

*T. PRASETIYO¹ S. DJADDANG² N. AHMAR³ / Determinan Tax Avoidance dengan
Kepemilikan Institutional Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan
Di BEI)*